



# **Bupati dan Seluruh Kepala Desa di Mamuju Hadiri Workshop Evaluasi Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023**

**MAMUJU, Terbitsulbar.com** – Seluruh Kepala Desa dan Camat di Kabupaten Mamuju mengikuti Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang dilaksanakan di Hotel Maleo Mamuju. Jumat (14/10/2022).

Kegiatan Workshop ini Sebagai bentuk tanggung jawab BPKP Sulbar dalam pengawalan keuangan negara dan daerah dari segala lini. Dana desa sebagai lini paling hilir keuangan negara, juga tak luput dari bagian pengawasan yang dilakukan oleh BPKP.

Kegiatan Workshop yang digelar oleh BPKP provinsi Sulawesi

barat tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Bupati Mamuju, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PMD, dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju.

Dalam sambutannya nya, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi menekankan agar para kepala desa tidak hanya berfokus pada program yang sifatnya tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Bimtek dan perjalanan Dinas. Sebab kata bupati, masih sangat banyak program yang membutuhkan intervensi bersama yang benar-benar bersifat urgent, seperti penanganan stunting, maupun penanganan kondisi takterduga terjadinya bencana.

Bupati Mamuju Sutinah Suhardi mengaku tidak melarang program pengembangan sumber daya manusia seperti Bimtek, sebab juga masih diperlukan, namun para kades diharap lebih bijak dalam memanfaatkan anggaran dana desa yang prinsipnya lebih kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, khusus untuk penanganan prevalensi stunting yang angkanya masih terbilang tinggi.



Bupati Mamuju menegaskan agar para kades dapat menganggarkan

pada fokus kegiatan berkenaan dengan hal tersebut pada tahun 2023, sehingga langkah pencegahan salah satu masalah kesehatan Nasional ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Untuk itu ia memerintahkan BPMD untuk melakukan evaluasi terhadap perencanaan tiap pemerintahan desa.

Sebelum itu, bupati Mamuju juga mengapresiasi kegiatan Workshop oleh BPKP dan BPMD. Ia berharap kegiatan serupa dapat dimanfaatkan oleh para kepala desa untuk meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan dana desa, agar lebih efektif serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, juga aman dari potensi pelanggaran.

Kepala desa Kalepu, Indo Upe, yang mengikuti kegiatan Workshop Evaluasi tersebut mengaku sangat terbantu atas adanya kegiatan Workshop terkait pengelolaan dana desa, namun demikian ia berharap kegiatan serupa dapat dikemas lebih dinamis seperti dengan Forum group discussion (FGD) atau pelatihan sehingga lebih interaktif dan mudah difahami oleh para kepala desa.

Berikutnya atas petunjuk bupati Mamuju yang mengharuskan adanya persiapan alokasi penanganan stunting pada APBD Desa, Ia juga sangat mendukung hal itu, sebab menurutnya sangat diperlukan intervensi secara positif dari pemerintah daerah maka penanganan Stunting bisa berjalan baik. (ADV)